

# Evaluasi Alokasi Anggaran Program "Makassar Recovery" dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi

Marlina Patrisya Sipatu <sup>1\*</sup>, Nayla Tabhita Cheryl <sup>2</sup>, Revienda Anita Fitrie <sup>3</sup>,  
Eva Hany Fanida <sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\* [25040674017@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674017@mhs.unesa.ac.id)

## Abstrak

The COVID-19 pandemic created significant pressure on regional fiscal capacity and local economic activities, including in Makassar City. As a strategic response, the Makassar City Government initiated the Makassar Recovery Program, which consists of three main pillars: Health Immunity, Social Adaptation, and Economic Recovery. This study aims to evaluate the structure of budget allocation for the Makassar Recovery Program and examine its contribution to strengthening community economic resilience after the pandemic. The study employed a qualitative descriptive approach using a literature review. Data were collected through document review of policy documents, regional financial reports, government publications, statistical reports, and relevant academic studies. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis and narrative synthesis, supported by the Value for Money approach to assess economy, efficiency, and effectiveness. The findings indicate that the Makassar Recovery Program was implemented during a period of local economic Recovery, as reflected in the improvement of Makassar City's economic growth from -2.19% in 2020 to 4.47% in 2021 and 5.40% in 2022. However, the evaluation identified limitations in budget transparency, particularly the limited availability of detailed expenditure information for individual activities and program pillars. These limitations constrain evidence-based evaluation and public oversight. The study implies that regional governments need to strengthen budget transparency, integrate digital monitoring systems, and provide more detailed performance and financial information. Overall, the Makassar Recovery Program was associated with the post-pandemic Recovery process, although stronger fiscal transparency and accountability remain necessary to support sustainable and measurable policy outcomes.

**Kata Kunci:** *Budget Evaluation, Budget Transparency, Economic Resilience, Makassar Recovery Program*

## Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan krisis besar yang mengguncang hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, mobilitas sosial, hingga aktivitas ekonomi di berbagai belahan dunia. Pembatasan pergerakan masyarakat, penurunan produksi, dan terganggunya rantai pasok global memicu kontraksi ekonomi yang signifikan. Indonesia tidak luput dari dampak ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020, sebelum akhirnya tumbuh kembali sebesar 3,70% pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menyebabkan penurunan kapasitas fiskal pemerintah daerah akibat meningkatnya kebutuhan belanja kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat (Suryahadi et al., 2021; Kadir et al.,

2021). Di tingkat daerah, pemerintah kota dan kabupaten juga menghadapi tekanan fiskal yang serius. Pemerintah Kota Makassar, misalnya, mencatat defisit APBD sebesar Rp587,92 miliar pada perubahan APBD 2021, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp3,57 triliun dan belanja daerah Rp 4,16 triliun (Shadiq, 2021). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun strategi pengeluaran yang lebih tajam dan terukur agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan upaya pemulihan ekonomi lokal. Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dengan mengubah prioritas belanja daerah menuju sektor yang lebih mendesak selama masa pandemi, terutama kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi (Setyoko & Wijaya, 2022; Kadir et al., 2021).

Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto meluncurkan Program Makassar *Recovery*. Program ini dirancang untuk mempercepat stabilisasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat pasca pandemi melalui tiga pilar utama, yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi. Inovasi ini mendapat perhatian nasional dan disebut sebagai salah satu inisiatif daerah dalam merespons pandemi secara terpadu (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2021). Program Makassar *Recovery* menunjukkan pendekatan kebijakan adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi krisis melalui integrasi antara penguatan kesehatan masyarakat, partisipasi sosial, dan strategi pemulihan ekonomi lokal (Muhajir & Annas, 2023).

Keberhasilan suatu program kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh bagaimana sumber daya anggaran dikelola dan dipertanggungjawabkan. Evaluasi terhadap alokasi anggaran menjadi krusial karena kondisi krisis menuntut prioritas belanja yang jelas dan mekanisme pengelolaan yang akuntabel. Dalam konteks ini, penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana struktur alokasi anggaran Program Makassar *Recovery* dirancang, diimplementasikan, serta berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti persoalan transparansi informasi anggaran yang menjadi catatan evaluatif penting dari program ini. Pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran pemerintah menghasilkan manfaat yang optimal serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik (Mardiasmo, 2018; Novianti et al., 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji Program Makassar *Recovery* dari berbagai perspektif untuk menilai pelaksanaan dan capaian program dalam menghadapi dampak pandemi. Penelitian mengenai evaluasi program menunjukkan bahwa pelaksanaan Makassar *Recovery* pada aspek kesehatan dan adaptasi sosial telah berjalan relatif baik, sedangkan aspek pemulihan ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan kesiapan sumber daya, koordinasi antaraktor pelaksana, dan efektivitas intervensi ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Meskipun demikian, struktur dan distribusi anggaran belum menjadi fokus utama analisis, sehingga masih terdapat ruang untuk mengkaji aspek penganggaran secara lebih spesifik (Halim et al., 2022).

Penelitian lainnya menjelaskan bahwa Program Makassar *Recovery* memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi melalui penguatan sistem kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran sosial, serta upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui pengaktifan kembali aktivitas masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program memiliki dampak multidimensional terhadap masyarakat, tetapi kajian lebih berfokus pada capaian

program dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi dibandingkan dengan bagaimana dukungan fiskal pemerintah daerah dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut (Muhajir & Annas, 2023).

Penelitian dari perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat menunjukkan bahwa Program Makassar *Recovery* memperoleh respons yang cukup positif karena dinilai mampu memberikan perlindungan kesehatan dan dukungan sosial selama masa pandemi. Respons tersebut menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap program sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi. Efektivitas implementasi program tetap dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat, pemahaman terhadap kebijakan, serta konsistensi pelaksanaan di tingkat lapangan. Kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program pemerintah, terutama pada kebijakan yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaannya (Hakim et al., 2023).

Beberapa penelitian menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan Program Makassar *Recovery*. Pemanfaatan media digital, penyampaian informasi publik, serta penyediaan saluran komunikasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program. Namun, keterbukaan informasi program melalui komunikasi publik belum secara langsung menggambarkan transparansi fiskal, khususnya terkait keterbukaan informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan dana program. Transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga mencakup keterbukaan mengenai proses pengelolaan sumber daya publik dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (Firman et al., 2023; Mardiasmo, 2018).

Kajian lain mengenai pemulihan ekonomi melalui Program Makassar *Recovery* menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar mengarahkan strategi pemulihan pada penguatan sektor ekonomi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi lokal. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan strategi kebijakan ekonomi pasca pandemi, tetapi belum secara spesifik menganalisis hubungan antara alokasi anggaran dengan pencapaian sasaran pemulihan ekonomi masyarakat (Jonatan et al., 2024). Dalam konteks pemerintah daerah, keberhasilan pemulihan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya fiskal secara efektif, menetapkan prioritas belanja, serta memastikan bahwa program publik memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat (Setyoko & Wijaya, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Program Makassar *Recovery* telah berkembang melalui berbagai pendekatan, mulai dari evaluasi implementasi program, dampak sosial-ekonomi, persepsi masyarakat, strategi komunikasi, hingga pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas aspek pengelolaan keuangan publik dalam program tersebut, terutama terkait bagaimana struktur alokasi anggaran ditetapkan, bagaimana prioritas belanja diarahkan, serta bagaimana penggunaan anggaran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan program. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menempatkan anggaran sebagai salah satu sumber daya pendukung implementasi, bukan sebagai aspek utama yang dianalisis

dalam hubungan dengan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik (Halim et al., 2022; Muhajir & Annas, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* dalam kajian Program Makassar *Recovery*, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif fiskal daerah, efektivitas program, dan transparansi pengelolaan anggaran dalam satu kerangka analisis. Padahal, dalam situasi krisis, keberhasilan program pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran, menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa belanja publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi faktor penting karena kualitas pengelolaan anggaran berhubungan erat dengan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018; Novianti et al., 2019).

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis yang menggabungkan aspek struktur alokasi anggaran, implementasi penggunaan anggaran, kontribusi Program Makassar *Recovery* terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, serta aspek transparansi dan akuntabilitas fiskal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada evaluasi program atau dampak kebijakan secara parsial, penelitian ini menempatkan anggaran publik sebagai instrumen utama dalam memahami keberhasilan intervensi pemerintah daerah selama masa pemulihan pasca pandemi. Pendekatan ini penting karena efektivitas kebijakan publik tidak hanya diukur berdasarkan keberadaan program, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil (Kadir et al., 2021; Setyoko & Wijaya, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan prioritas alokasi anggaran Program Makassar *Recovery*, mengkaji implementasi penggunaan anggaran dalam mendukung tiga pilar utama program, mengevaluasi kontribusi program terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan Program Makassar *Recovery*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pengelolaan keuangan publik dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pemulihan ekonomi yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

## **Metode**

### ***Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan dan pengelolaan anggaran Program Makassar *Recovery* sebagai strategi pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi COVID-19. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan keuangan daerah, dokumen pelaksanaan program, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan keuangan publik dan evaluasi kinerja anggaran. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pendekatan *Value for Money* yang menilai kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan tiga indikator utama, yaitu aspek ekonomi (*economy*), efisiensi (*efficiency*), dan efektivitas (*effectiveness*). Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi anggaran Program Makassar *Recovery* telah dikelola secara optimal dalam mendukung tujuan pemulihan ekonomi daerah.

## **Strategi Pencarian Literatur dan Kata Kunci**

Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber akademik dan dokumen resmi menggunakan beberapa basis data, seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, serta situs resmi pemerintah daerah dan lembaga terkait. Strategi pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu "*Makassar Recovery*", "*anggaran daerah*", "*evaluasi anggaran publik*", "*Value for Money*", "*efisiensi belanja pemerintah daerah*", "*pemulihan ekonomi pasca pandemi*", dan "*keuangan publik daerah*". Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2019–2025 untuk mempertahankan relevansi dengan konteks pandemi COVID-19 dan kebijakan pemulihan ekonomi daerah. Selain artikel ilmiah, penelitian juga menggunakan dokumen resmi pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi Program Makassar *Recovery*.

## **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi berbagai sumber yang relevan. Data penelitian terdiri atas beberapa jenis, yaitu: (1) dokumen anggaran daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran, serta dokumen keuangan Pemerintah Kota Makassar; (2) dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan Program Makassar *Recovery*; (3) artikel jurnal ilmiah yang membahas keuangan publik, pengelolaan anggaran daerah, evaluasi kebijakan, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi; (4) buku referensi yang berkaitan dengan teori keuangan publik dan evaluasi kinerja anggaran; serta (5) publikasi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional yang relevan dengan kebijakan pemulihan ekonomi.

## **Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur**

Pemilihan sumber literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan kualitas dan relevansi data yang digunakan. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel ilmiah yang membahas pengelolaan keuangan publik, evaluasi anggaran, *Value for Money*, atau kebijakan pemulihan ekonomi; (2) publikasi yang tersedia dalam jurnal nasional maupun internasional yang dapat diverifikasi; (3) dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan APBD, laporan keuangan, dan implementasi Program Makassar *Recovery*; serta (4) literatur yang diterbitkan dalam periode 2019–2025. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel opini atau berita yang tidak memiliki dukungan data empiris; (2) sumber yang tidak memiliki identitas penerbit yang jelas; (3) dokumen yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian; serta (4) literatur yang memiliki informasi tidak lengkap atau tidak dapat diverifikasi.

## **Proses Seleksi Literatur**

Proses seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi, penyaringan, evaluasi kelayakan, dan penetapan sumber akhir yang digunakan dalam analisis. Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan berbagai artikel jurnal, dokumen pemerintah, dan laporan kebijakan berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan dengan menilai kesesuaian judul, abstrak, serta isi dokumen terhadap tujuan penelitian. Literatur yang memenuhi kriteria kemudian dievaluasi berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas sumber, serta keterbaruan informasi. Literatur yang lolos tahap evaluasi digunakan sebagai dasar analisis mengenai pengelolaan anggaran Program Makassar *Recovery* berdasarkan perspektif *Value for Money*. Hasil seleksi literatur selanjutnya disusun secara sistematis untuk mendukung proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi (*document review*). Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari dokumen tertulis berupa laporan keuangan daerah, regulasi pemerintah, laporan pelaksanaan program, serta publikasi ilmiah yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan observasi tidak langsung terhadap dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan Program Makassar *Recovery* untuk memahami proses perencanaan, pengalokasian, dan realisasi anggaran program. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara langsung karena fokus penelitian diarahkan pada analisis dokumen dan evaluasi kebijakan berbasis data sekunder. Namun, informasi dari berbagai sumber dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program.

### ***Teknik Analisis dan Sintesis Data***

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan sintesis naratif (*narrative synthesis*). Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis melalui proses reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran dilakukan menggunakan konsep *Value for Money* dengan tiga indikator utama. Aspek ekonomi dianalisis berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber daya dengan biaya yang optimal. Aspek efisiensi dianalisis dengan membandingkan penggunaan input anggaran terhadap output program yang dihasilkan. Sementara itu, aspek efektivitas dianalisis berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan Program Makassar *Recovery* dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan masyarakat.

### ***Teknik Keabsahan Data***

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen pemerintah, laporan keuangan daerah, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi lembaga resmi. Perbandingan antar sumber dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi, mengurangi potensi bias interpretasi, dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif mengenai pengelolaan anggaran Program Makassar *Recovery* serta memberikan gambaran mengenai tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pemulihan ekonomi daerah.

## **Hasil**

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap dokumen pemerintah, laporan lembaga pengawas, data statistik resmi, dan literatur akademik yang berkaitan dengan implementasi Program Makassar *Recovery*. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penyaringan sumber, pengelompokan tematik, serta triangulasi untuk membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber. Penyajian hasil diarahkan untuk menggambarkan kondisi program, mengidentifikasi tema-tema utama dalam implementasinya, serta melihat kesesuaian antara perencanaan kebijakan, pelaksanaan program, dan hasil yang dilaporkan.

### ***Tahapan Seleksi dan Analisis Sumber***

Sumber data penelitian diperoleh dari dokumen Pemerintah Kota Makassar, laporan lembaga pengawas, data statistik resmi, serta literatur akademik yang relevan dengan Program

Makassar Recovery dan pemulihan sosial-ekonomi Kota Makassar. Penelitian ini tidak dirancang sebagai systematic literature review, sehingga jumlah sumber pada tahap identifikasi awal tidak didokumentasikan secara kuantitatif. Oleh karena itu, proses penyaringan dilakukan berdasarkan kesesuaian substansi sumber dengan fokus penelitian.

Tahap pertama dilakukan melalui identifikasi dokumen dan literatur yang membahas Program Makassar Recovery, kondisi fiskal Kota Makassar, implementasi kebijakan penanganan pandemi, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Tahap kedua berupa penyaringan sumber berdasarkan relevansi isi, kredibilitas sumber, keterkaitan dengan tujuan penelitian, dan kelengkapan informasi. Sumber yang tidak membahas fokus penelitian secara langsung, memiliki informasi yang tidak memadai, atau hanya mengulang informasi dari sumber lain tidak digunakan dalam analisis. Tahap selanjutnya dilakukan dengan membaca dan membandingkan substansi sumber yang telah memenuhi kriteria untuk mengidentifikasi pola informasi yang berulang. Hasil proses tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam sejumlah tema utama dan dianalisis melalui triangulasi sumber.

### **Gambaran Program Makassar Recovery**

Program Makassar Recovery merupakan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang dirancang sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan bahwa sebagian besar UMKM mengalami gangguan usaha akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Dari sisi fiskal daerah, pandemi juga memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Kota Makassar. Kondisi tersebut terlihat dari perubahan pendapatan dan belanja daerah selama periode pandemi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

*Tabel 1. Kondisi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2020–2021*

| Indikator           | 2020            | 2021            |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Pendapatan Daerah   | Rp3,30 triliun  | Rp3,57 triliun  |
| Belanja Daerah      | Rp4,21 triliun  | Rp4,16 triliun  |
| Defisit/Surplus     | -Rp0,91 triliun | -Rp0,59 triliun |
| Pertumbuhan Ekonomi | -2,19%          | 4,47%           |

Berdasarkan Tabel 1, kondisi fiskal Kota Makassar pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya tekanan anggaran selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menunjukkan defisit sebesar Rp0,91 triliun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah meningkat menjadi Rp3,57 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,16 triliun sehingga defisit berkurang menjadi Rp0,59 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendapatan sekaligus kebutuhan belanja yang tetap tinggi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan dampak pandemi. Dari sisi perekonomian, Kota Makassar mengalami kontraksi sebesar -2,19% pada tahun 2020 sebelum kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,47% pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2023). Perubahan tersebut menjadi konteks penting dalam memahami kebutuhan kebijakan pemulihan daerah.

Program Makassar Recovery kemudian dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam merespons berbagai dampak pandemi melalui tiga pilar utama, yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi. Struktur tersebut menunjukkan bahwa

orientasi program bersifat multidimensional karena tidak hanya berfokus pada penanganan kesehatan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial dan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaksanaan ketiga pilar tersebut membutuhkan dukungan sumber daya dan pengelolaan anggaran yang memadai agar setiap intervensi dapat berjalan sesuai tujuan. Kondisi fiskal daerah pada periode tersebut menjadi faktor kontekstual yang penting dalam menilai implementasi Program Makassar *Recovery*.

### ***Hasil Pengelompokan Tematik***

Analisis terhadap sumber yang telah memenuhi kriteria menunjukkan adanya pola informasi yang berulang dan kesamaan substansi mengenai pelaksanaan Program Makassar *Recovery*. Berdasarkan kesamaan substansi, fokus pembahasan, dan temuan yang diidentifikasi, hasil analisis dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas, efektivitas implementasi program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak ekonomi dan pemulihan masyarakat. Pengelompokan tema tersebut dilakukan untuk mempermudah identifikasi berbagai aspek implementasi program secara sistematis dan memberikan kerangka analisis yang lebih terarah. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun analisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Makassar *Recovery* sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

***Tabel 2. Hasil Pengelompokan Tematik Program Makassar Recovery***

| Tema Utama                              | Fokus Analisis                                                          | Hasil Identifikasi                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparansi dan akuntabilitas          | Keterbukaan informasi program dan penggunaan anggaran                   | Informasi mengenai program tersedia melalui publikasi pemerintah, tetapi ketersediaan informasi anggaran secara rinci masih memerlukan penguatan    |
| Efektivitas implementasi program        | Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan dan pilar program                  | Program dilaksanakan melalui tiga pilar yang mencakup kesehatan, sosial, dan pemulihan ekonomi                                                      |
| Efisiensi penggunaan sumber daya        | Pemanfaatan anggaran, koordinasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan | Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, sementara pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien               |
| Dampak ekonomi dan pemulihan masyarakat | Perubahan kondisi ekonomi daerah, aktivitas masyarakat, dan UMKM        | Kondisi ekonomi menunjukkan proses pemulihan yang ditandai dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi ke arah positif dan pemulihan aktivitas masyarakat |

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengelompokan menunjukkan bahwa implementasi Program Makassar *Recovery* memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pencapaian pemulihan ekonomi, karena juga berkaitan dengan aspek tata kelola kebijakan publik. Tema transparansi dan akuntabilitas mencerminkan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan program serta pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Tema efektivitas menunjukkan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan program, sedangkan tema efisiensi menekankan optimalisasi penggunaan sumber daya serta pentingnya monitoring dan pengawasan. Tema dampak ekonomi menggambarkan perubahan kondisi ekonomi, aktivitas masyarakat, dan keberlanjutan proses pemulihan setelah program dilaksanakan.

### ***Triangulasi Temuan Implementasi Program Makassar Recovery***

Analisis dilanjutkan melalui triangulasi terhadap dokumen pemerintah, laporan lembaga pengawas, dan literatur akademik. Triangulasi digunakan untuk membandingkan informasi antar-sumber serta memperkuat interpretasi mengenai implementasi, akuntabilitas, dan dampak Program Makassar *Recovery* (Halim et al., 2022; Muhajir & Annas, 2023). Hasil triangulasi disajikan pada Tabel 3.

*Tabel 3. Triangulasi Sumber Evaluasi Program Makassar Recovery*

| Aspek Evaluasi                          | Dokumen Pemerintah                                             | Lembaga Pengawas                                                                     | Literatur Akademik                                                        | Sintesis Temuan                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transparansi dan akuntabilitas          | Informasi program tersedia melalui publikasi pemerintah daerah | Keterbukaan informasi rinci masih memerlukan peningkatan                             | Transparansi merupakan unsur penting dalam akuntabilitas publik           | Informasi program tersedia, tetapi transparansi secara rinci belum optimal                          |
| Efektivitas implementasi                | Program dijalankan melalui tiga pilar utama                    | Pelaksanaan program dapat dievaluasi melalui capaian dan kesesuaiannya dengan tujuan | Efektivitas berkaitan dengan ketercapaian tujuan kebijakan                | Program telah diimplementasikan melalui kerangka intervensi kesehatan, sosial, dan ekonomi          |
| Efisiensi penggunaan sumber daya        | Pelaksanaan melibatkan kolaborasi berbagai pihak               | Pengawasan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran                           | Pendekatan Value for Money menekankan keterkaitan antara input dan output | Efisiensi pelaksanaan perlu didukung monitoring dan pengawasan yang memadai                         |
| Dampak ekonomi dan pemulihan masyarakat | Pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan arah positif           | Aktivitas masyarakat dan UMKM menunjukkan proses pemulihan                           | Belanja dan intervensi publik dapat berperan dalam stimulasi ekonomi      | Program berlangsung dalam periode pemulihan ekonomi dan mendukung penguatan ketahanan ekonomi lokal |

Berdasarkan Tabel 3, triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian pada beberapa aspek antara informasi pemerintah, pengawasan kelembagaan, dan literatur akademik. Pelaksanaan Program Makassar Recovery telah mencakup intervensi pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, sementara indikator ekonomi daerah menunjukkan proses pemulihan setelah kontraksi pada awal pandemi. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa transparansi dan ketersediaan informasi anggaran secara rinci masih menjadi aspek yang perlu diperkuat untuk mendukung proses evaluasi dan pengawasan publik. Ketersediaan informasi yang memadai penting karena akuntabilitas program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan sumber daya publik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Hasil analisis tematik dan triangulasi memperlihatkan bahwa Program Makassar Recovery dilaksanakan dalam konteks kebutuhan pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi dengan cakupan intervensi yang relatif luas. Empat tema yang muncul menunjukkan bahwa evaluasi program perlu mempertimbangkan secara bersamaan aspek transparansi dan akuntabilitas, efektivitas implementasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dampak ekonomi dan pemulihan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi program tidak hanya berfokus pada perubahan indikator ekonomi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan ketersediaan informasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban kebijakan publik.

## Pembahasan

### *Evaluasi Transparansi Informasi Anggaran*

Salah satu catatan kritis dalam pelaksanaan Program Makassar Recovery adalah keterbukaan informasi anggaran. Pemerintah Kota Makassar telah mempublikasikan informasi mengenai program kepada masyarakat, tetapi informasi yang tersedia pada sumber publik yang dianalisis masih lebih banyak menunjukkan nilai anggaran secara agregat dan gambaran umum penggunaannya. Rincian pengeluaran pada tingkat kegiatan, perangkat daerah, maupun

masing-masing pilar program belum seluruhnya tersedia dalam bentuk yang memungkinkan publik melakukan penelusuran secara mudah dan sistematis.

Kondisi tersebut perlu dibedakan dengan keberadaan sistem *e-budgeting* di Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar bukan tidak menggunakan *e-budgeting*, karena sistem tersebut telah menjadi bagian dari pengembangan pemerintahan digital dan integrasi antara perencanaan dengan penganggaran daerah. Namun, keberadaan *e-budgeting* sebagai instrumen administrasi internal belum secara otomatis menjadikannya media transparansi publik yang menyediakan rincian anggaran Program Makassar *Recovery*. Kajian mengenai reformasi digital budgeting di Makassar menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* telah mendukung transparansi, tetapi pemanfaatannya masih menghadapi persoalan kapasitas digital, fragmentasi antar pemangku kepentingan, ketergantungan pada platform, dan keterbatasan kedalaman partisipasi masyarakat (Khaerah et al., 2026).

Belum optimalnya pemanfaatan *e-budgeting* sebagai media transparansi publik dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, sistem digital pemerintahan di Makassar masih menghadapi kebutuhan integrasi antar aplikasi dan data dari berbagai perangkat daerah. Kedua, fungsi *e-budgeting* lebih banyak diarahkan pada integrasi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan internal sehingga informasi yang dapat diakses masyarakat belum selalu memiliki tingkat detail yang sama dengan informasi yang tersedia bagi pengelola pemerintahan. Ketiga, efektivitas transformasi digital juga dipengaruhi oleh kompetensi TIK aparatur, kesiapan infrastruktur, kepemimpinan, dan budaya birokrasi. Hambatan berupa kurangnya integrasi data, keterbatasan infrastruktur TIK, kompetensi digital, serta faktor budaya birokrasi dan kepemimpinan juga ditemukan dalam implementasi *e-government* di Indonesia (Susilawati et al., 2023).

Kondisi tersebut berseberangan dengan prinsip transparansi anggaran yang mensyaratkan keterbukaan informasi secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu kepada publik. Transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas serta mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik (Khotimah et al., 2026). Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital seperti *e-budgeting* pada dasarnya dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan mendukung proses monitoring keuangan publik apabila sistem tersebut terintegrasi dan menyediakan akses informasi yang memadai bagi masyarakat (Rahmawati et al., 2026; Susilawati et al., 2023).

Keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap kemampuan peneliti dan publik dalam menilai apakah anggaran telah terserap secara efektif dan proporsional pada tiga pilar Program Makassar *Recovery*. Karena itu, penguatan transparansi tidak cukup hanya melalui digitalisasi proses penganggaran, tetapi juga memerlukan penyediaan antarmuka informasi publik yang menampilkan alokasi, realisasi, output, dan capaian setiap kegiatan secara terstruktur. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada ketiadaan *e-budgeting*, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan sistem tersebut sebagai instrumen keterbukaan anggaran yang dapat diakses dan dievaluasi oleh masyarakat.

### ***Evaluasi Efektivitas Anggaran***

Terlepas dari keterbatasan data anggaran secara rinci, sejumlah indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas Program Makassar *Recovery*. Dari sisi implementasi, berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan sosial dan ekonomi telah dilaksanakan, termasuk dukungan terhadap UMKM dan masyarakat terdampak. Namun, penilaian efektivitas tidak

seharusnya hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran, melainkan juga pada kesesuaian antara sumber daya yang digunakan, keluaran program, dan manfaat yang diterima masyarakat.

Perspektif tersebut sejalan dengan prinsip *Value for Money* dalam pengelolaan sektor publik yang menekankan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi agar sumber daya publik dapat menghasilkan capaian program secara optimal (Hikmah et al., 2026; Nuzula et al., 2026). Penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan bahwa pencapaian target fiskal memerlukan penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian agar fluktuasi penerimaan maupun penggunaan sumber daya dapat dikelola secara lebih efektif (Marsuni & Kamal, 2024). Dengan demikian, efektivitas Program Makassar *Recovery* perlu dilihat sebagai hubungan antara pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, dan capaian sosial-ekonomi yang dihasilkan. Keterbatasan informasi rinci menyebabkan ukuran efisiensi biaya pada masing-masing pilar belum dapat dibandingkan secara presisi. Oleh sebab itu, penguatan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan sistem monitoring dan pelaporan kinerja menjadi penting agar evaluasi efektivitas program tidak hanya bergantung pada indikator makro, tetapi juga dapat dilakukan sampai pada tingkat kegiatan.

### **Dampak Program terhadap Ketahanan Ekonomi**

Dampak Program Makassar *Recovery* terhadap ketahanan ekonomi lokal dapat ditelusuri melalui sejumlah indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berubah dari kontraksi sebesar -2,19% pada tahun 2020 menjadi pertumbuhan positif sebesar 4,47% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,40% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, pertumbuhan tersebut berada di atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,09% dan nasional sebesar 5,31% (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun demikian, perubahan indikator makro tersebut tidak dapat sepenuhnya diatribusikan kepada Program Makassar *Recovery* karena pemulihan ekonomi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan kebijakan lainnya.

Pemulihan juga terlihat pada aktivitas UMKM dan ketenagakerjaan. Bertambahnya aktivitas usaha setelah periode pembatasan menunjukkan kemampuan sektor ekonomi lokal untuk beradaptasi terhadap kondisi pasca pandemi. Dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat relevan dalam mempertahankan daya tahan ekonomi lokal, khususnya bagi kelompok yang paling terdampak krisis. Penelitian pada program bantuan pemerintah menunjukkan bahwa intervensi publik dapat membantu masyarakat terdampak, meskipun keberlanjutan manfaat sangat ditentukan oleh desain dan jangka waktu program (Sulaiman, 2021). Penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan pemerintah daerah dan optimalisasi program pemberdayaan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi lokal (Nuzula et al., 2026).

Indikator lainnya terlihat pada penurunan jumlah penduduk miskin Kota Makassar dari 74.690 jiwa pada tahun 2021 menjadi 71.830 jiwa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Perubahan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi pada periode pemulihan, meskipun hubungan kausal langsung dengan Program Makassar *Recovery* belum dapat ditetapkan berdasarkan data sekunder yang digunakan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kemampuan pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan, pengawasan, dan pengendalian fiskal merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah (Marsuni & Kamal, 2024).

### **Faktor Pendukung**

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pemulihan kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi Program Makassar *Recovery*. Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas masyarakat juga memungkinkan pelaksanaan program menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perkembangan digitalisasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan transparansi program sekaligus mendukung UMKM dalam memperluas akses pasar. Transformasi digital pemerintahan dapat meningkatkan kualitas tata kelola apabila didukung oleh integrasi data, infrastruktur, kapasitas SDM, dan kepemimpinan yang memadai (Susilawati et al., 2023).

### **Faktor Penghambat**

Sejumlah kendala memengaruhi optimalisasi implementasi program. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dapat mempersempit ruang pemerintah dalam menyediakan dukungan secara berkelanjutan, sedangkan koordinasi antarperangkat daerah berpotensi menimbulkan fragmentasi data dan proses kerja. Keterbatasan sistem monitoring serta belum tersedianya informasi rinci mengenai realisasi anggaran pada setiap kegiatan juga menyulitkan pengukuran efisiensi dan dampak program secara presisi. Dalam konteks digitalisasi anggaran, persoalan tersebut semakin berkaitan dengan integrasi sistem, kompetensi SDM, dan kesiapan kelembagaan. Karena itu, *e-budgeting* seharusnya tidak hanya digunakan sebagai perangkat administrasi penganggaran, tetapi dikembangkan menjadi bagian dari sistem transparansi publik yang terhubung dengan *e-planning*, *e-monitoring*, dan pelaporan kinerja. Penguatan integrasi sistem, keterbukaan informasi, pengawasan, dan kapasitas aparatur menjadi prasyarat penting agar digitalisasi pengelolaan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas program pemerintah daerah (Khotimah et al., 2026; Rahmawati et al., 2026; Hikmah et al., 2026; Susilawati et al., 2023).

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makassar *Recovery* merupakan kebijakan pemulihan pasca pandemi yang dirancang secara terintegrasi melalui tiga pilar utama, yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, dan Pemulihan Ekonomi. Struktur program menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan penanganan krisis kesehatan dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dari perspektif efektivitas, program ini memberikan kontribusi terhadap proses pemulihan ekonomi Kota Makassar yang ditunjukkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dari -2,19% pada tahun 2020 menjadi 4,47% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,40% pada tahun 2022, disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan aktivitas sektor UMKM.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemulihan daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi informasi, dan mekanisme pengawasan publik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bergantung pada data sekunder dan keterbukaan informasi anggaran yang belum sepenuhnya rinci pada tingkat kegiatan maupun masing-masing pilar program. Kesenjangan tersebut membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, evaluasi dampak berbasis indikator kinerja, maupun studi empiris melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah daerah direkomendasikan untuk memperkuat sistem transparansi digital, menyediakan laporan anggaran yang lebih terperinci, serta meningkatkan

mekanisme monitoring dan evaluasi agar implementasi program pemulihan ekonomi daerah dapat berjalan lebih akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.

## Acknowledgment

-

## Daftar Pustaka

- Annas, A. (2023). Kebijakan adaptif terhadap penanganan pandemi COVID-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 487–506.  
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.16089>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.  
<https://www.bpk.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh 3,70 persen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.  
<https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2023). *Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun 2022*. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.  
<https://makassarkota.bps.go.id>
- Firman, Y. F., Halim, A., & Hidayat, R. (2023). Strategi komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dalam upaya menyukseskan Program Makassar Recovery. *CORE: Journal of Communication Research*, 1(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.47650/core.v1i1.700>
- Guntur, M., Nur, A. C., & Setiawan, T. (2022). Evaluation of Makassar City Government Recovery Program. *IAPA Proceedings Conference*, 301–311.  
<https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.702>
- Hakim, N. A. T., Pasaribu, D., & Fadiyah, D. (2023). Analisis persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recovery. *Journal of Political Issues*, 5(1), 82–93.  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130>
- Halim, D., Sakawati, H., Setiawan, T., & Haedar, A. W. (2022). Evaluation of the Government's Makassar Recovery Program in Makassar City. *PINISI Discretion Review*, 6(1), 87–98.  
<https://doi.org/10.26858/pdr.v6i1.40434>
- Hikmah, M. N., Mahdani, R., & Syafrizal, S. (2026). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Studi kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya). *Journal Social Society*, 6(2), 915–927.  
<https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1145>
- Kadir, A., Suaib, E., & Zuada, L. H. (2021). Government budgeting reform during COVID-19 pandemic: Evidence from local government in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 375–385.  
<https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.33154>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Refocusing anggaran dan inovasi pemerintah daerah untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-*

19. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.  
<https://www.ekon.go.id>
- Khaerah, N., Fatmawati, F., Hawing, H., & Hardi, R. (2026). Strategic co-creation and synergistic partnerships in digital budgeting reform: Strengthening public governance for sustainable cities in Makassar, Indonesia. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7, 1716088. <https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1716088>
- Khotimah, C., Zulfah, M. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Analisis peran masyarakat dalam monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto. *Journal Social Society*, 6(3), 2397–2409.  
<https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1415>
- Jonatan, S., Bahri, S., & Juharni, J. (2024). Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi melalui Program Makassar Recovery. *Paradigma Journal of Administration*, 2(1), 34–40.  
<https://doi.org/10.35965/pja.v2i1.4604>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Assessing accountability of performance measurement system and local government budgetary management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 16(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.22146/gamaijb.5388>
- Marsuni, N. S., & Kamal, N. A. A. (2024). Optimizing regional original income: A comprehensive analysis and assessment of revenue management practices in Pangkajene Regency and Islands. *Income Journal of Economics Development*, 4(1), 20–24. <https://doi.org/10.54065/ijed.4.1.2024.206>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muhajir, H., & Annas, A. (2023). The Impact of the Makassar Recovery Program on COVID-19 Response. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 27(1), 1–15.  
<https://doi.org/10.22146/jkap.77905>
- Novianti, A., Kusumah, W. R., Rusmawan, V., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Nuzula, H. F., Wulandari, R. M., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Kabupaten Gresik periode 2021–2025. *Journal Social Society*, 6(3), 1711–1720.  
<https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1336>
- Rahmawati, A., Mysah, Z. L., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Peran e-budgeting dalam meningkatkan transparansi dan monitoring keuangan publik di Surabaya. *Journal Social Society*, 6(3), 2471–2480.  
<https://doi.org/10.54065/jss.6.3.2026.1443>
- Shadiq, M. (2021, December 21). *Anggaran besar realisasi minim, Rp1,48 triliun APBD Kota Makassar belum terpakai*. Kataberita.co. <https://kataberita.co/anggaran-besar-realisasi-minim-rp148-triliun-apbd-kota-makassar-belum-terpakai/>

- Setyoko, P. I., & Wijaya, S. S. (2022). Policy change: Refocusing local government budgets in response to COVID-19. *KnE Social Sciences*, 7(9), 881–890.  
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10986>
- Sulaiman, M. Y. (2021). *Dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of COVID-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267–296.  
<https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi digital pemerintah (Studi kasus: Implementasi e-Government dan hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80–94.  
<https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>